



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

**OPTIMALISASI SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI MELALUI REGISTRASI TERPADU  
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**NAMA : AHMAD DAHLAN, M.Pd**  
**NIP. : 19791116 200912 1 001**  
**N D H : 24**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2019**

## EXECUTIVE SUMMARY

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memiliki 2 (dua) jabatan fungsional, yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang disebut juga dengan Pengawas Pemerintahan (P2UPD/P2) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Sebagai instansi pembina jabatan fungsional maka Kementerian Dalam Negeri salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengembangan karir para pejabat fungsional tersebut adalah pengembangan kompetensi dan sertifikasi jabatan, diantara tugas pembina instansi jabatan fungsional lainnya maka kedua tugas tersebut melekat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi jabatan dalam bentuk uji kompetensi merupakan salah satu syarat bagi jabatan fungsional untuk dapat naik satu tingkat dalam jabatan dan pangkat lebih tinggi, oleh karena itu maka setiap pejabat fungsional binaan Kemendagri tentunya dapat menata dan merencanakan dengan baik setiap pengembangan karir tersebut karena selain angka kredit maka diklat dan uji kompetensi adalah syarat melekat yang mesti ada yang dibuktikan dengan sertifikat diklat dan sertifikat kompetensi.

Tahun 2019, sampai dengan periode bulan 30 Juni 2019 BPSDM Kemendagri telah melaksanakan setidaknya 8 (delapan) angkatan diklat untuk 238 pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dan 2 (dua) angkatan untuk 60 pejabat fungsional Satpol-PP. Untuk semester 2, periode Juli sampai dengan Desember 2019 pun sudah diagendakan beberapa angkatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Berangkat dari gambaran di atas maka mekanisme pelaksanaan administrasi jabatan fungsional binaan Kemendagri haruslah tertata dengan baik karena untuk dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi sangat banyak potensi peserta yang dapat terlibat atau mengikuti kegiatan dimaksud sedangkan syarat dan ketentuan mesti terpenuhi untuk mengikuti kegiatan dimaksud maka sistem administrasi yang berbentuk registrasi terpadu menjadi salah satu pola atau metode yang dapat digunakan untuk memaksimalkan mekanisme sistem administrasi yang sudah berjalan secara manual selama ini karena kebutuhan yang memang sudah sangat mendesak.